



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 5788/2000/PR.03.05/06/2025

13 Juni 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rencana PNBP Mahkamah Konstitusi TA 2026
dalam rangka penyusunan RUU APBN (Pagu Anggaran
TA 2026)

Yth.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

Bapak Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A.

di Jakarta

Berkenaan dengan surat dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-40/AG/AG.7/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Penyampaian Rencana PNBP Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Rencana PNBP Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2026 dalam rangka penyusunan RUU APBN (Pagu Anggaran TA 2026).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

Heru Setiawan

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI.



Digital Signature
mk745316033250617033737



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

**PROPOSAL
RENCANA PNB
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2026**

TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2026

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Selain empat kewenangan dimaksud, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di samping itu, berdasarkan penafsiran Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang dilakukan MK dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 maka kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pun tidak lagi bisa disebut sebagai kewenangan tambahan. Dengan perluasan makna pemilu yang mencakup pemilihan kepala daerah maka secara konstitusional MK memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

MK mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam mengelola organisasinya, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instansi pemerintahan wajib menyusun rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rencana PNBP tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk proposal rencana PNBP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak .

II. VISI DAN MISI

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip *checks and balances*, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

Visi

Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya

Misi

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;
3. Meningkatkan Kualitas Putusan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan eksternal dan internal, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut dengan memberikan dukungan dari segi teknis administrasi justisial maupun administrasi umum.



III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 2 dan Pasal 11, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi;
- b. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Tugas teknis administratif peradilan yang dijalankan oleh kepaniteraan meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
3. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan tugas teknis administratif yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
2. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
3. Pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
4. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Kepaniteraan adalah menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, administrasi hakim, administrasi kepaniteraan dan risalah, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
3. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
5. Fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis;
6. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi;
7. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;



8. Pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
9. Pelaksanaan pengawasan internal; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi

IV. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di lingkungan Mahkamah Konstitusi mengacu pada surat Kepala KPKNL Jakarta IV atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-255/MK.6/WKN.07/KNL.04/2021 tanggal 27 Desember 2021 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-185/MK.6/KN.5/2020 tanggal 3 September 2020 hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Konstitusi.

V. REALISASI PNBP TA 2023 S.D TA 2024

A. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2023

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 30 November 2022, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2023 adalah sebesar **Rp277.768.692,-**. Dan Perkiraan Realisasi PNBP pada TA 2023 adalah sebesar **Rp3.536.596.929,-**. Rincian realisasi PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2023

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	0,-	5.700.900,-	100
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	15.000.000,-	787.764.014,-	5251,7
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	262.768.692,-	2.268.982.694,-	863,5
4	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	425793	0,-	9.268.680,-	100
5	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	425139	0,-	118.828.000,-	100
6	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	20.923.997,-	100



No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	30.943.700,-	100
8	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	258.029.944,-	100
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	36.155.000,-	100
Jumlah			277.768.692,-	3.536.596.929,-	1273,2%

B. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2024

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2024 tanggal 24 November 2023, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2024 adalah sebesar **Rp.1.627.546.468,-**. Dan Perkiraan Realisasi PNBP pada TA 2024 adalah sebesar **Rp. 2.224.611.542,-** Rincian perkiraan realisasi PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2024

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	314.777.776,-	801.730.798,-	255
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	1.312.768.692,-	255.800.406,-	19
3	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	425793	0,-	1.300.000,-	100
4	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	34.460.350,-	100
5	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	252.563.747,-	100
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	50.265.040,-	100
7	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	501.594.436,-	100
8	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	2.700.000,-	100
	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	0,-	324.196.765,-	100
Jumlah			1.627.546.468,-	2.224.611.542,-	137%



VII. PERKIRAAN REALISASI PNBP TA 2025

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2025 tanggal 2 Desember 2024, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2025 adalah sebesar **Rp. 3.111.028.000,-**. Dan Perkiraan Realisasi PNBp pada TA 2024 adalah sebesar **Rp. 3.111.028.000,-**. Rincian perkiraan realisasi PNBp tersebut dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Perkiraan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2025

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	115.000.000,-	115.000.000,-	-
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	2.996.028.000,-	2.996.028.000,-	-
3	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	0,-	0,-	-
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	0,-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	0,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	0,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	0,-	-
8	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	0,-	-
Jumlah			3.111.028.000,-	3.111.028.000,-	100%

Pada TA 2025 MK menargetkan PNBp sebesar **Rp3.111.028.000,-** yang berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp.115.000.000,- serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa Sewa Rumah Dinas yang berada di Bekasi sebesar Rp.2.996.028.000,-.

VIII. TARGET PNBp TA 2026

Pada TA 2026 MK menargetkan PNBp sebesar **339.512.000,-** yang berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar **Rp.70.000.000,-** serta Pendapatan Sewa Tanah,



Gedung, dan Bangunan sebesar **Rp.269.512.000,-**. Rincian Target PNBP selama TA 2026 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2026

No	Kode MAP	Jenis PNBP	Vol	Tarif (Rp)	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)	Ket
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya				70.000.000,-	
2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan				269.512.000-	
		• PT.BRI (Persero) (ATM di Rumah Dinas)			1 thn	17.917.000,-	Sewa Tahunan
		• Sewa Rumah Dinas MK				251.595.000,- (dibulatkan)	Dibayar Setiap tahun
		- Rumah Eselon I	2 unit x 12 bln		1 thn	46.875.312,-	
		- Rumah Eselon II	1 unit x 12 bln		1 thn	9.143.016,-	
			3 unit x 12 bln		1 thn	26.732.880,-	
		- Rumah Eselon III	9 unit x 12 bln		1 thn	50.038.560,-	
			17.930.484,-		1 thn	17.930.484,-	
- Rumah Eselon IV	3 unit x 12 bln		1 thn	68.407.416,-			
	21 unit x 12 bln		1 thn	28.955.520,-			
	10 unit x 12 bln		1 thn	3.510.864,-			
	1 unit x 12 bln		1 thn				
Jumlah						339.512.000,-	

IX. TARGET PNBP TA 2027-2030

Rincian target PNBP TA 2027 sampai dengan TA 2030 sebagaimana tercantum dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Target PNBP TA 2027-2030

No	Kode MAP	Jenis PNBP	TA 2027	TA 2028	TA 2029	TA 2030	Ket
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	77,000,000	80,850,000	84,893,000	89,137,125	
2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,982,410,700	271,348,493	3,128,591,000	1,070,327,625	
		Koperasi Konstitusi	282,645,300		296,777,565		Pembayaran Kontrak sewa



	(Toserba dan Kantin Gd. 1)					2 tahunan luas 174,91 m2
	· Koperasi (Tambahkan ruang gedung kantor di Medan Merdeka Barat no. 6)	173,038,800		190,342,680		Pembayaran Kontrak sewa 2 tahunan luas 88 m2
	· Koperasi (Gedung Serbaguna)	1,968,312,150		2,066,727,658		Pembayaran Kontrak untuk masa sewa 2 tahun luas 1.146 m2
	· PT. BRI (Kantor Kas MK Jakarta)				796,954,400	Pembayaran Kontrak untuk masa sewa 2 tahun luas 60,47 m2
	· PT. BRI (ATM Raden Ajeng Kartini, Bekasi)	18,812,850	19,753,493	20,741,167	21,778,225	Sewa Tahunan Tanah untuk ATM di Komplek Rumah Bekasi luas 8,12 m2
	· Rumah Dinas	251,595,000	251,595,000	251,595,000	251,595,000	Sewa Rumah Dinas di Bekasi
	Jumlah	3,059,410,700	352,198,493	3,213,483,500	1,159,464,750	

X. JUSTIFIKASI ATAS PENINGKATAN ATAU PENURUNAN TARGET PNBP TA 2025 TERHADAP TARGET PNBP TA 2024

Target PNBP Mahkamah Konstitusi pada TA 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan target PNBP TA 2025, hal ini dikarenakan,

- Pada tahun 2025, berdasarkan Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi nomor **S-185/MK.06/KN.5/2020** hal Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan untuk 5 (lima) tahun untuk sewa Koperasi di Gedung Kantor Medan Merdeka Barat no.6, yaitu sebesar Rp.672.965.000,- dan Pembayaran Sewa Tanah & Bangunan (GSG) MK Kepada Koperasi Konstitusi utk Jangka Waktu 2 Tahun Sesuai dg Surat Menteri Keuangan



No : S-127/MK.6/KNL.0704/2023 sebesar Rp.1.874.583.000,- serta ada sewa rumah dinas sebesar Rp. 262.768.692,-

XI. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2023 s.d. TA 2024

Seluruh PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada TA 2023 dan TA 2024 disetorkan kepada kas negara, sehingga tidak ada dana PNBP yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Mahkamah Konstitusi.

XII. PERKIRAAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2025

Untuk TA 2025, tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

XIII. PAGU PENGGUNAAN PNBP TA 2027 S.D 2030

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 33 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mahkamah Konstitusi tidak akan menggunakan PNBP untuk TA 2027 s.d 2030.

Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam rangka penyusunan Kapasitas Fiskal.

Jakarta, 13 Juni 2025

**Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan**

